

Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha*¹, Ashfiya Nur Atqiya², Aisha Arista Widiya³,
Rismaya Wulandari⁴, Riski Muhamad Sholeh Triatmojo⁵, Ardiyan Nugraheni⁶

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com¹, Ashfiy.anura@gmail.com², aisharistawidiya@gmail.com³,
rismayawd1@gmail.com⁴, riskimuhamadsleht@gmail.com⁵, nugraheniardian19@gmail.com⁶

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com*

Abstract : Pancasila is the foundation and guideline of life for the Indonesian people, which contains five important values as state goals. The history of the formation of Pancasila reflects the processes and dynamics that occurred in Indonesian society, both in the pre-independence, independence and Old Order eras. In this context, Pancasila is not only considered as the basis of the state, but also as a moral and ethical guideline in the behavior of the nation. This research examines how the values of Pancasila play a role in shaping national identity and facing the challenges of globalization, as well as the importance of youth in living and implementing these values to maintain the spirit of nationhood.

Keywords : Pancasila, Dynamics, History of the Indonesian Nation.

Abstrak : Pancasila merupakan landasan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, yang berisi lima nilai penting sebagai tujuan negara. Sejarah pembentukan Pancasila mencerminkan proses dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, baik pada era pra-kemerdekaan, kemerdekaan, maupun Orde Lama. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan dalam membentuk identitas nasional dan menghadapi tantangan globalisasi, serta pentingnya pemuda dalam menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut untuk mempertahankan semangat kebangsaan.

Kata Kunci : Pancasila, Dinamika, Sejarah Bangsa Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Banyak orang Indonesia, terutama generasi muda yang memiliki cita-cita tinggi untuk meraih kemerdekaan, memiliki rasa nasionalisme yang kuat pada tahun-tahun menjelang peristiwa bersejarah tersebut. Peran penting yang dimainkan oleh pemuda Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan menunjukkan hal ini. Situasinya cukup memprihatinkan sekarang, di era perkembangan yang cepat ini. Para pemimpin masa depan negara ini, para pemuda, tidak dapat diandalkan dan telah kehilangan rasa patriotisme yang pernah mereka miliki. Berdasarkan data survei tahun 2013, Madani Center menyimpulkan bahwa mayoritas anak muda saat ini adalah produk dari dampak budaya Barat yang merasuk. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pengenalan gaya hidup hedonis dari Barat, yang mempromosikan kehidupan tanpa beban dengan cara apa pun, dan tren serupa telah menyebabkan kesusahan besar dalam masyarakat dan negara kita.

Di kalangan anak muda saat ini, patriotisme adalah sikap dan tindakan ceroboh yang

dapat menyebabkan saling menegur, pertengkaran, perkelahian, dan bahkan pameran kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesombongan. Selain itu, bersikap patriotik dipandang sebagai sesuatu yang formalitas bagi mereka yang berada di dunia militer atau penegak hukum. Landasan filosofis negara ini, Pancasila, tidak mudah dihafal atau dipahami oleh beberapa anggota generasi muda saat ini. Pengaruh globalisasi terhadap generasi muda saat ini tidak dapat dipungkiri. Hal-hal yang terjadi sehari-hari seperti itu bertentangan dengan rasa kebanggaan nasional dan patriotisme yang kuat dari generasi pasca-kemerdekaan, yang mereka tunjukkan dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan, yang siap mempertaruhkan nyawa.

Pancasila telah lama dikenal sebagai komponen integral dari nilai-nilai budaya Indonesia dan sebagai landasan yang mendasari negara Indonesia. Kedudukannya dalam sejarah nasional Indonesia juga bukan hal yang baru. Prinsip-prinsipnya kemudian diformalkan sebagai dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dan pandangan hidup warga negara Indonesia membentuk fondasi Pancasila. Beberapa nilai telah dipegang teguh oleh masyarakat nusantara sejak zaman dahulu. Teori kausalitas Notonagoro-“causa materialis,” “causa formalis,” “causa efisien,” dan “causa finalis”-lah yang memunculkan prinsip-prinsip Pancasila. Menurut Putri (2020), merosotnya prinsip-prinsip Pancasila dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dapat dikaitkan dengan maraknya konflik yang melanda negeri ini.

Kelima prinsip panduan Pancasila telah bersama masyarakat Indonesia untuk waktu yang sangat lama dan telah berkembang bersama mereka. Semua peristiwa dalam sejarah telah terjadi dalam kaitannya dengan satu sama lain. Sepanjang masa lampu, ada hubungan antara peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, selama periode lampu, semua orang berfokus pada masa kini dan sekarang dalam upaya menciptakan masa depan yang berbeda dari masa sebelumnya. Untuk meletakkan dasar bagi sebuah negara, dibutuhkan fondasi yang kuat yang dapat menopang dan berfungsi sebagai pijakan. Demikian pula, Pancasila berfungsi sebagai landasan di mana negara Indonesia dibangun. Aturan hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk semua elemennya-pemerintah, wilayah, dan rakyat-berasal dari Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara. Dengan kedudukannya yang demikian, Pancasila merupakan batu penjurur yang menjadi dasar bagi berdirinya Negara Replubik Indonesia dan yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Selain itu, setiap sumber hukum dapat ditelusuri kembali ke Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan negara, dan semua peraturan perundang-undangan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi dasar bagi semua hukum di Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif atau pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dari studi pustaka. Metode inidengan cara telaah pustaka dari berbagai sumber dan referensi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pancasila Pada Era Pra Kemerdekaan

Sunoto (1984), berdasarkan penelitiannya tentang filsafat Pancasila, menyatakan bahwa dasar-dasar budaya Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia. Dia mencatat bahwa meskipun Pancasila tidak secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga 18 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kehidupan mereka yang merdeka untuk waktu yang cukup lama sebelum tanggal tersebut.

Perancangan Pancasila pada sidang BPUPKI

Rancangan dasar negara Republik Indonesia diselamatkan oleh BPUPKI. Diputuskan untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan delapan orang yang diketuai oleh Soekarno untuk melanjutkan pembahasan sebelum kabinet BPUPKI dibubarkan. Tugas Panitia Kecil adalah menyusun rekomendasi dan pendapat BPUPKI untuk dimasukkan ke dalam agenda sidang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sebagai ketua Panitia Kecil, Soekarno berinisiatif membentuk Panitia 9, yang terdiri dari:

- a. Ir. Soekarno (ketua)
- b. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- c. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
- d. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
- e. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
- f. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- g. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
- h. Haji Agus Salim (anggota)
- i. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Perancangan Pancasila pada sidang PPKI

Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa akibat penjajahan bangsa Barat atas negara mereka. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris adalah penjajah Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, peristiwa ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa mereka, yang masih terus berkembang hingga saat ini. Sebagai hasil dari penderitaan mereka,

para pejuang dan pahlawan Indonesia berani untuk berperang melawan negara-negara tersebut.

Meskipun Pancasila tidak secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga 18 Agustus 1945, Sunoto (1984) berpendapat bahwa asal-usul budaya Pancasila dapat ditelusuri kembali ke masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian tentang filsafat Pancasila, yang mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila telah digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama beberapa waktu.

Banyak aspek budaya Indonesia, termasuk tradisi, sastra, bahasa, seni, kepercayaan, dan agama, yang berakar pada masa lalu Indonesia yang panjang dan penuh cerita. Ada sebuah pernyataan yang dibuat oleh Sunoto pada tahun 1984. Sunoto menguraikannya dengan menyajikan fakta-fakta sejarah, seperti:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa* : bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab* : bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia.
3. *Persatuan Indonesia* : bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* : bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
5. *Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia* : bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.

Dinamika Pancasila Masa Awal Kemerdekaan

Menurut kepercayaan umum, Pancasila muncul pada saat Indonesia belum menjadi sebuah negara, dan berfungsi sebagai peta jalan bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara bangsa Indonesia, yang menandai berakhirnya sebuah perjalanan panjang.

Ideologi dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kehidupan sosial warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pancasila. Meskipun demikian, pada kenyataannya, prinsip-prinsip Pancasila telah dipraktikkan atau diterapkan secara berkala sejak kemerdekaan. Dari waktu ke waktu, penerapan Pancasila telah berkembang. Pergeseran kebijakan resmi merupakan salah satu elemen yang menyebabkan penerapan

Pancasila berkembang dari waktu ke waktu.

Menurut situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Pancasila berlaku sejak tahun-tahun awal kemerdekaan (1945-1959). Pada masa setelahnya, Pancasila menjadi prinsip panduan masyarakat Indonesia dan dasar negara Indonesia. Rakyat Indonesia selalu bercita-cita untuk bebas dari pemerintahan kolonial dan mendirikan negara mereka sendiri. Artinya, rakyat Indonesia, terlepas dari bahaya internal dan eksternal, ingin menjadi pihak yang menentukan nasib negaranya sendiri, bebas dari pengaruh penjajah. Ada banyak perubahan bagi rakyat Indonesia selama masa kemerdekaan ini juga. Pancasila mengalami masa percobaan demokrasi tak lama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ketika itu, sistem kabinet parlementer dan demokrasi multi-partai di Indonesia masih dalam tahap percobaan. Proses politik pada masa itu sangat efektif dalam mempertahankan lima prinsip Pancasila sebagai dasar negara, dan partai-partai politik tumbuh subur pada masa itu.

Pada masa kemerdekaan ini, Pancasila mencapai puncak kejayaannya. Pancasila kemudian memasuki masa-masa tergelapnya pada tahun 1959, ketika Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin.

Pada masa ini, presiden berusaha menggunakan integrasi paternalistik sebagai taktik politik untuk menjaga berbagai kekuatan di bawah kendalinya. Paternalisme didefinisikan sebagai keyakinan bahwa satu kelompok memiliki pengetahuan atau otoritas yang lebih tinggi dan harus dapat mengatur atau mengendalikan kelompok lain. Yang terakhir, sistem ini tampaknya merusak prinsip-prinsip Pancasila sendiri, termasuk musyawarah-sila keempat Pancasila.

Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta bersejarah pada tahun 1965. Presiden Soekarno mendelegasikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk memimpin Indonesia pada tanggal 11 Maret 1965. Selama periode kemerdekaan Indonesia, Pancasila memainkan peran penting. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukannya:

- a) Meskipun tidak tertulis secara resmi dalam konstitusi, Pancasila menjadi dasar bagi para pemimpin kemerdekaan.
- b) Rakyat Indonesia memandang Pancasila sebagai panduan bagi pemerintahan, kemajuan sosial, supremasi hukum, dan kehidupan sehari-hari.
- c) Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan persatuan dalam keberagaman adalah prinsip utama Pancasila.
- d) Pembukaan UUD 1945 terutama berisi Pancasila.

Namun, masa-masa awal kemerdekaan bukanlah masa yang mulus bagi penerapan Pancasila. Beberapa masalah muncul selama era kemerdekaan sebagai akibat dari penerapan Pancasila, dan ini termasuk:

Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia)

Yaitu, pada tanggal 18 September 1948, di Madiun. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah negara Komunis di dalam Uni Soviet. Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan pemerintah Republik Indonesia berselisih selama pemberontakan PKI. Komunis, Sosialis, anggota Partai Buruh Indonesia, anggota SOBSI, dan anggota Pesindo membentuk FDR, sebuah kelompok oposisi di sisi kiri di Indonesia. Butuh waktu tiga bulan, namun Gerakan Operasi Militer I (GOM I) yang dilancarkan pemerintah berhasil mengakhiri pemberontakan PKI. Mayoritas anggota dan pemimpin FDR ditangkap dan dibunuh oleh TNI.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pemberontakan DI/TII diantaranya adalah:

- a. Pemberontakan DI/TII ini terjadi mulai 7 Agustus 1949 di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.
- b. Pemberontakan DI/TII ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, beliau adalah seorang mantan nasionalis Indonesia yang enggan mengakui Republik Indonesia.
- c. Pemberontakan DI/TII ini juga menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh.
- d. Gerakan DI/TII ini terpecah setelah Sekarmadji berhasil ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962.
- e. Pemberontakan DI/TII ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia.
- f. Yang melatarbelakangi pemberontakan DI/TII di Tasikmalaya ini yaitu ketidakpuasan DI/TII dengan hasil Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Tujuan pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri. Ketidakpuasan masyarakat Maluku Selatan terhadap rencana kembalinya Maluku ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kekuatan pendorong di balik pemberontakan

Republik Maluku Selatan (RMS). Gagasan bahwa Maluku dapat menjadi sebuah negara merdeka karena kekuatan geografis, politik, dan ekonominya juga menjadi dasar pemberontakan ini. Ambon menjadi pusat proklamasi pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipelopori oleh Dr. Christian Steven Soumokil. Beberapa hal yang terkena dampak dari pemberontakan Republik Maluku Selatan:

- Banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak
- Migrasi pengungsi ke Belanda
- Ketidakstabilan keamanan dan politik antar kelompok di Maluku

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat.

Antara tahun 1957 dan 1960, terdapat dua gerakan protes besar di Indonesia yang menentang pemerintah pusat: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Ketidakpuasan terhadap apa yang dilihat sebagai keberpihakan pemerintah pusat terhadap Jawa dalam pembangunan daerah memicu gerakan PRRI dan PERMESTA. Aspirasi untuk merdeka dan komitmen terhadap keadilan sosial masih terlihat jelas pada masa-masa awal penerapan Pancasila, meskipun mengalami kesulitan. Hal ini terlihat jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum dan perlindungan segenap bangsa Indonesia adalah tujuan negara Indonesia.

Secara luas diyakini bahwa “Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” (Pancasila) adalah landasan gerakan kemerdekaan Indonesia. Semua lapisan masyarakat, dari tingkat lokal, nasional, hingga negara, bersandar pada prinsip kemanusiaan ini.

Filosofi antropologi, yang menyatakan bahwa manusia adalah individu yang unik dan bagian dari keseluruhan sosial yang lebih besar, serta makhluk yang diciptakan menurut citra Tuhan Yang Maha Esa, memberikan dasar pemikiran yang alami dan menarik bagi nilai yang melekat pada setiap manusia. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh warga negara, sebagai individu yang beradab, terkait dengan martabat manusia, terkandung dalam tuntutan kemanusiaan.

Oleh karena itu, hak asasi manusia, sebagai hak dasar manusia, harus dilindungi oleh hukum dan peraturan negara untuk mencapai tujuan mencapai martabat manusia yang setinggi-tingginya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam peraturan perundang-undangan negara.

Sepanjang sejarah Indonesia, terutama pada tahun-tahun awal kemerdekaan dan

pembentukan negara, Pancasila telah memainkan peran penting sebagai dokumen panduan Republik Indonesia.

Beberapa cara yang paling signifikan di mana Pancasila membentuk kehidupan era kemerdekaan adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Negara: Pancasila adalah landasan filosofi Indonesia, yang menjadi dasar bagi seluruh bangsa dan negara. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memberikan negara Indonesia dan warganya sebuah arah dan tujuan ketika mereka membangun sistem pemerintahan dan menjalani kehidupan sehari-hari.
- b. Persatuan dan Solidaritas: Keragaman agama, etnis, dan budaya menimbulkan masalah yang signifikan bagi Indonesia yang baru saja merdeka. Sila ketiga dari Pancasila, “Persatuan Indonesia,” sangat penting dalam mempromosikan persatuan dalam menghadapi keragaman tersebut. Hal ini membantu dalam menyelesaikan potensi perselisihan dan perpecahan di antara penduduk.
- c. Legitimasi Politik: Pemerintah dan sistem pemerintahan Indonesia boleh berbangga dengan Pancasila, yang memberikan mereka legitimasi politik. Pancasila dihormati sebagai dasar negara yang sah pada masa-masa awal kemerdekaan dan berfungsi sebagai panduan untuk pembuatan undang-undang dan konstitusi, termasuk Pembukaan UUD 1945.
- d. Prinsip Etika dan Moral: Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga berperan sebagai kode moral dan etika. Menanamkan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial, seperti yang diuraikan dalam Pancasila, sangat penting untuk membentuk karakter bangsa.
- e. Pengembangan Kebijakan dan Program: Berbagai program dan kebijakan pemerintah dirumuskan dengan menggunakan prinsip-prinsip Pancasila. Secara khusus, Pancasila digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.
- f. Melindungi Republik Indonesia dari Radikalisasi dan Separatisme: Pancasila adalah alat untuk mencegah radikalisasi dan gerakan separatisme dalam kerangka menjaga keutuhan negara. Pancasila melawan ideologi-ideologi yang dapat membahayakan stabilitas negara dengan menekankan pentingnya keberagaman dan persatuan.

Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Pancasila telah berfungsi sebagai falsafah hidup dan kerangka kerja untuk kemajuan negara.

Pancasila Pada Era Orde Lama

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah ada sejak masa awal kemerdekaan , yaitu pada masa orde lama . Pelaksanaan Pancasila pada masa orde lama terbagi menjadi dua periode , yaitu :

Periode pertama berlangsung pada tahun 1945-1959.

Pada masa inilah demokrasi liberal parlementer didirikan di Indonesia. Pada periode pertama, terdapat dua fase penerapan Pancasila di Indonesia. Fase pertama, dari tahun 1945 hingga 1950, diwarnai dengan berbagai gangguan ketika berbagai kelompok berusaha untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada tahap kedua, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, implementasinya lebih cenderung mengarah pada ideologi liberal.

Periode kedua berlangsung dari tahun 1959-1966.

Demokrasi terpimpin diberlakukan pada masa itu.

Presiden Soekarno menetapkan panggung bagi pemerintahannya dengan memberlakukan kembali UUD 1945. Kebijakan dalam diskusi perwakilan memimpin apa yang disebut demokrasi terpimpin, sebuah bentuk khas demokrasi Indonesia. Menghidupkan kembali kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan konstitusi 1945 adalah tujuan utama dari demokrasi terpimpin. Implementasi aktual dari demokrasi terpimpin sangat bertentangan dengan makna yang dinyatakan.

Secara khusus, Pancasila diideologikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Pancasila dicita-citakan untuk menjadi prinsip panduan dan identitas nasional Indonesia. Meskipun Presiden Soekarno mengakui bahwa Pancasila didasarkan pada mitologi dan tidak jelas bagaimana hal itu akan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia, ia masih memiliki keberanian untuk menjadikan konsep Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia.

Selama periode ini, Pancasila ditafsirkan melalui lensa pandangan dunia yang muncul sebagai respons terhadap pergolakan global dan pergeseran sosial dan budaya yang terjadi sebagai akibat dari pergeseran dari masyarakat yang terjajah ke masyarakat yang merdeka. Pada masa ini, masyarakat berusaha mencari cara untuk mempraktikkan Pancasila, terutama dalam kerangka negara. Akibatnya, Pancasila dipraktikkan dengan berbagai cara. Mengalahkan Belanda, yang berusaha mempertahankan koloni mereka di Indonesia dari tahun 1945 hingga 1950, rakyat Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai prioritas utama.

Namun, perselisihan internal segera terjadi setelah pengusiran penjajah di

Indonesia. Demokrasi parlementer menghalangi penerapan prinsip keempat, yang menekankan pada diskusi dan kesepakatan. Meskipun perdana menteri secara resmi menjadi kepala pemerintahan, tanggung jawab utama presiden adalah mengepalai negara. Sistem ini tidak dapat diterapkan dalam praktiknya, meskipun Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar negara.

Pada tahun 1948, dengan pemberontakan Madiun, PKI berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan komunisme, yang mulai merongrong persatuan rakyat Indonesia. Selain itu, ada juga kelompok DI/TII yang berusaha mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dari tahun 1950 hingga 1955, Pancasila diimplementasikan sebagai ideologi liberal, yang pada praktiknya tidak mampu menjamin stabilitas politik. Sila keempat tidak dirumuskan melalui konsensus melainkan dengan suara terbanyak, meskipun Pancasila tetap menjadi dasar negara. Struktur pemerintahan

Dinamika Pancasila pada era orde lama

Ideologisasi Pancasila berarti bahwa Pancasila dibentuk dan ditanamkan sebagai ideologi nasional dan karakter Indonesia.

Di bawah orde lama, Pancasila diimplementasikan secara parsial, terutama dalam sistem konstitusional. Masyarakat yang dipandu oleh prinsip-prinsip Pancasila tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Sebagai komponen revolusi Indonesia, Ir. Soekarno menciptakan Pancasila, yang ditafsirkannya melalui paradigma USDEK.

Sebagai sarana untuk memandu negara ke depan, ia menekankan pentingnya mempertahankan UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan identitas nasional. Namun, hasil akhirnya adalah kudeta yang direncanakan PKI dan penggulingan Presiden Soekarno.

Ketidakpuasan kelompok Islam terhadap keputusan UUD 1945 untuk menghapus Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 merupakan pendorong utama hal ini. Hal ini terutama terjadi ketika pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap organisasi-organisasi Islam melalui Pancasila.

Ketika, pada akhir 1950-an, Pancasila tidak lagi menjadi landasan bagi semua ideologi, yang bertentangan dengan maksud Soekarno, hal ini menjadi jelas. Seruan Islam untuk pengakuan resmi terhadap Islam telah didelegitimasi melalui senjata ideologis Pancasila. Memang, Presiden Soekarno secara terang-terangan menyuarakan kekhawatirannya pada tahun 1953 mengenai potensi kerusakan persatuan Indonesia yang

dapat diakibatkan oleh kelompok-kelompok Islam yang bersikeras dengan seruan mereka untuk mendirikan negara Islam. Lebih jauh lagi, Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia, pada saat itu karena kecurigaan bahwa para anggotanya terlibat dalam pemberontakan yang terinspirasi oleh Islam di berbagai daerah.

Selama periode ini, terjadi pula penyimpangan dari pemahaman konstitusional Pancasila. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno menjadi otoriter; ia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup dan semakin menjauhkan Republik Indonesia dengan merangkul ekstremisme agama, komunisme, dan nasionalisme.

Sebagai senjata politik dan ideologi, Pancasila digunakan selama era orde lama. Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, dan kelompok-kelompok Islam memiliki kepentingan yang saling bersaing dan bersinggungan, yang kemudian menyebabkan terjadinya berbagai pemberontakan. Gerakan G-30 S/PKI, pemberontakan komunis, adalah puncak dari kekacauan tersebut.

Dari tahun 1945 hingga 1950, rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan mereka melawan Belanda, yang berusaha untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Namun demikian, setelah pengusiran penjajahan, bangsa Indonesia mulai menghadapi masalah internal. Sila keempat, yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat, tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan politik karena bentuk demokrasi yang digunakan adalah demokrasi parlementer.

Sementara perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan, tanggung jawab tunggal presiden adalah sebagai kepala negara. Ketidakstabilan pemerintahan diakibatkan oleh sistem ini. Sistem ini tidak dapat diterapkan dalam praktiknya, meskipun Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar negara. Pada tahun 1948, dengan pemberontakan Madiun, PKI berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan komunisme, yang mulai merongrong persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga kelompok DI/TII yang berusaha mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dari tahun 1950 hingga 1955, Pancasila diimplementasikan sebagai ideologi liberal, yang pada praktiknya tidak mampu menjamin stabilitas politik. Sila keempat tidak dirumuskan melalui konsensus melainkan dengan suara terbanyak, meskipun Pancasila tetap menjadi dasar negara.

Situasi Sosial dan Politik Era Orde Lama pada 1945-1950

Indonesia harus berjuang untuk kemerdekaannya dari penjajah di bawah orde lama, yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Belanda kembali dengan tujuan untuk menjajah kembali. Kedatangan Sekutu pada

tanggal 29 September 1945 memungkinkan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Mereka melancarkan serangan ke beberapa provinsi di Indonesia. Indonesia membalas ketika permusuhan kembali terjadi. Contoh dari salah satu pertempuran ini adalah pertempuran 5 hari di Semarang (15-20 Oktober 1945), diikuti oleh pertempuran di Padang (15 Oktober 1945), pertempuran di Kotabaru Yogyakarta (7 Oktober 1945), dan akhirnya pertempuran di Surabaya (10 November 1945).

Semua tindakan ini dilakukan untuk mencegah penjajahan di tanah air. Mereka berjuang tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara diplomatis. Dalam berbagai perundingan, seperti Konferensi Linggar Jati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar, para pemimpin Indonesia berusaha untuk mempertahankan persatuan nusantara dengan menggunakan pendekatan yang moderat dan tanpa kekerasan. Pada tanggal 25 Maret 1947, dalam perundingan Linggar Jati, situasi disepakati bahwa Jawa, Madura, dan Sumatra akan menjadi satu-satunya wilayah Indonesia. Perundingan ini juga mengakui bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) telah terbentuk. Meskipun hasil perundingan masih diperdebatkan, para pemain kunci dalam pergerakan Indonesia melihat hal ini sebagai langkah maju dalam perjuangan mereka (Suhartono W. Pranoto).

Amir Syarifuddin dan kaum sosialis demokrat (PKI) dipimpin oleh Sutan Syahrir, sementara kaum sosialis yang memimpin kabinet, Partai Sosialis, terpecah menjadi dua faksi. Sebagai konsekuensi dari perpecahan ini, Amir Syarifudin menggantikan Syahrir sebagai perdana menteri dan Syahrir diturunkan jabatannya.

Meskipun kabinet Amir Syarifudin kuat sebagai sebuah koalisi, partai-partai politik sekali lagi menentang perjanjian Renville setelah kabinet Amir Syarifudin menerimanya.

Proses Jatuhnya Kekuasaan Orde Lama

Bagi rezim Orde Lama, tahun 1966 adalah tahun simalakama. Bung Revolusi, pemimpin yang sangat karismatik dan blak-blakan, secara tak terduga kehilangan kursi kepresidenannya. Padahal, MPRS telah melantiknya secara resmi sebagai presiden seumur hidup. Ia menjadi pertapa karena politik yang dikaguminya selama menjabat sebagai kepala eksekutif. Baik dia maupun ideologinya terasing. Di sisi lain, Mayor Jenderal Soeharto mengibaratkan tahun 1966 seperti tertimpa durian runtuh.

Setelah diangkat sebagai pejabat oleh presiden dan dipromosikan menjadi jenderal penuh, karirnya melesat. Pemuda asal Kemusuk, Bantul ini ditempatkan dengan mantap di kursi kepemimpinan RI-1 karena perannya yang sangat penting dalam memulihkan stabilitas sosial-politik pasca tragedi G-30-S dan menjadikan Supersemar sebagai surat “pengalihan kekuasaan”.

Soeharto melakukan hal kontroversial tersebut tanpa berpikir dua kali. Meskipun Presiden Soekarno memprotesnya, ia segera membubarkan Partai Komunis Indonesia dan menangkap sekitar 12 menteri dari Kabinet yang beranggotakan 100 orang (Frans Magnis-Suseno SJ, 2011).

Supersemar dan Legitimasi Kekuasaan Soeharto

Setelah tragedi 1965, Soeharto mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan ibu kota sebagai salah satu perwira senior yang ditunjuk setelah tujuh jenderal terbunuh dalam insiden tersebut. Setelah kematian Jenderal Ahmad Yani, ia segera berangkat untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat.

Dengan ditunjuknya Mayor Jenderal Pranoto Resosamudro sebagai caretaker, Presiden Soekarno sebelumnya mengambil alih komando angkatan darat. Selain itu, ia menggantikan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Menurut James Luhulima (2001: 305-306), ia juga secara sepihak mengumumkan keadaan darurat, memonopoli media yang memungkinkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membentuk opini publik sesuai keinginannya, menjadikannya langkah yang paling efektif. Kebijakan ini dipertahankannya selama lebih dari tiga dekade sebagai presiden.

Pendidikan Indonesia pada masa orde lama

Ketentuan yuridis konstitusional tersebut diberi kekuatan hukum dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini memiliki konsekuensi formal dan non-formal. Republik Indonesia mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia.

Menurut urutan kronologis peristiwa dalam sejarah Indonesia, dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan terus berlanjut hingga hari ini. Jadi, tahun 1945-1950 dan 1950-1966 merupakan era Orde Lama dalam pendidikan Indonesia. Berbagai peristiwa dan tonggak penting terjadi pada masa-masa ini.

Indonesia mempertahankan sistem pendidikan pasca-kemerdekaannya dari tahun 1945 hingga 1950, mengikuti jejak Jepang dalam menggunakan model sekolah tunggal untuk ketiga tingkat pendidikan. Namun, rencana pelajaran tidak berubah, dan sekolah-sekolah terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Berikut ini adalah metode pengajaran yang digunakan dari tahun 1945 hingga 1950:

- a. Pendidikan Rendah
- b. Pendidikan Guru
- c. Pendidikan Umum

- d. Pendidikan Kejuruan
- e. Pendidikan Teknik
- f. Pendidikan Tinggi
- g. Pendidikan Tinggi Republik
- h. Pendidikan Tinggi Penduduk Belanda.

Pembahasan

Lima prinsip mendalam yang membentuk Pancasila telah ada sejak lama dan telah tumbuh bersama bangsa Indonesia. Semua peristiwa dalam sejarah telah terjadi dalam kaitannya dengan satu sama lain. Sepanjang masa lampu, ada hubungan antara peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode lampu, semua usaha manusia difokuskan pada masa kini dan sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa lalu. Di atas fondasi itulah sebuah negara dapat dibangun, yang berfungsi sebagai pijakan dan sumber kekuatan. Demikian pula, Pancasila berfungsi sebagai landasan di mana negara Indonesia dibangun. Aturan hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk semua elemennya-pemerintah, wilayah, dan rakyat-berasal dari Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara. Dengan kedudukannya yang demikian, Pancasila merupakan batu penjurur yang menjadi dasar bagi berdirinya Negara Replubik Indonesia dan yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Selain itu, setiap sumber hukum dapat ditelusuri kembali ke Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan negara, dan semua peraturan perundang-undangan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Aturan hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk semua elemennya-pemerintah, wilayah, dan rakyat-diturunkan dari Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara. Dalam bentuknya yang sekarang, Pancasila berfungsi sebagai fondasi di mana pemerintahan dibangun. Selain itu, setiap sumber hukum dapat ditelusuri kembali ke Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar negara, dan semua peraturan perundang-undangan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, semua hukum yang mengatur Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Sebagai ideologi nasional dan prinsip panduan Indonesia, Pancasila berdiri sebagai simbol keberagaman negara dalam kesatuannya. Burung garuda mewakili bangsa ini sebagai simbol keagungan dan kekuatan.

Bukti dari hal ini dapat ditemukan di banyak aspek budaya Indonesia, termasuk

namun tidak terbatas pada tradisi, sastra, bahasa, seni, kepercayaan, dan agama. Ada sebuah pernyataan yang dibuat oleh Sunoto pada tahun 1984. Sunoto menguraikannya dengan menyajikan fakta-fakta sejarah, seperti:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa : bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab : bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia.
- c. Persatuan Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan : bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
- e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.

Mengapa penerapan prinsip-prinsip Pancasila perlu dilakukan secara cair? Karena, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, “Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya bukan di zamanmu.” Saya percaya bahwa hal ini benar adanya. Mereka diciptakan untuk zaman tertentu, tetapi Anda diciptakan untuk zaman yang berbeda. Generasi muda bertanggung jawab untuk mengadaptasi Pancasila ke zaman modern, sehingga masuk akal jika interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsipnya harus mencerminkan hal tersebut.

Setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat dari berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila yaitu keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan. Baik dalam kehidupan pribadi maupun kebijakan publik, Pancasila berfungsi sebagai landasan dan pendorong untuk semua yang dilakukan. Perwujudan nilai Pancasila dalam undang-undang Indonesia sangat penting bagi fungsi negara. Karena ketika Pancasila dimasukkan ke dalam sebuah peraturan, ia dapat berfungsi sebagai kompas bagi seluruh masyarakat, mengarahkan tindakan mereka agar sesuai dengan aturan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Setiap sila dalam Pancasila saling bergantung dan tidak terpisahkan satu sama lain. Integritas dan sistem hukum negara Indonesia terancam jika salah satu dari kelima sila tersebut dihilangkan. Keragaman budaya Indonesia yang kaya, bersama dengan moto nasional kita “Bhineka Tunggal Ika”, berfungsi untuk menyatukan kita semua.

Prinsip-prinsip Pancasila tertanam kuat dalam budaya Indonesia. Pengembangan prinsip-prinsip Pancasila ini menumbuhkan pola pikir yang analitis dan logis, menurut Soeryanto (1991: 59). Karena berasal dari karakter Indonesia yang unik, nilai-nilai tersebut juga selaras dengan kepercayaan masyarakat. Tindakan seseorang harus dipandu oleh Pancasila, yang merupakan prinsip-prinsip kehidupan (Meinarno dan Mashoedi: 2016). Jika dilihat dari sudut pandang moral kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dan memberikan corak yang khas.

Berinvestasi pada manusia melalui pendidikan adalah cara untuk meningkatkan standar sumber daya manusia sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dunia modern dengan lebih baik. Investasi terhadap masa depan seseorang dapat dilakukan melalui proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan. Oleh karena itu, di era globalisasi yang semakin meningkat ini, penting bagi upaya pembangunan untuk memasukkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan jika tujuan nasional ingin dicapai.

4. SIMPULAN

Evolusi Pancasila, ideologi nasional Indonesia, secara berkala dibentuk oleh berbagai peristiwa dan revolusi. Terlepas dari niat baik pemerintah, mempertahankan Pancasila dan menyelaraskan semua kebijakan dengan prinsip-prinsip luhurnya telah terbukti menjadi hambatan dalam praktiknya sepanjang sejarah. Sering kali, kebijakan dan praktik pemerintah menyimpang dari prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila.

Banyak kelompok revolusioner yang berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain pada masa awal kemerdekaan, ketika Pancasila masih dalam tahap pembentukan. Kediktatoran dan ideologi komunis di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno kemudian menghambat upaya untuk mengideologikan Pancasila. Hingga 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, para penguasa di era orde baru memanipulasi Pancasila untuk meningkatkan kekuasaan para pejabat negara. Sepanjang era reformasi dan setelahnya, penerapan Pancasila dianggap semakin sulit. Arus globalisasi yang tak terbendung telah membuat ancaman yang muncul menjadi tidak signifikan dan sering diabaikan.

Karena tidak ada ideologi lain yang lebih tepat diterapkan di Indonesia selain Pancasila, maka keberadaannya sebagai dasar negara menjadi sangat penting. Fakta bahwa sila-sila Pancasila telah berhasil mewujudkan keharmonisan dan persatuan di antara keragaman yang ada adalah bukti dari hal ini.

Ketika merumuskan kebijakan dan strategi untuk melindungi Pancasila dari bahaya apa

pun terhadap statusnya sebagai ideologi negara, sangat penting untuk mempertimbangkan semua perkembangan sejarah Pancasila. Setiap anggota masyarakat Indonesia harus memahami bahwa melindungi prinsip-prinsip Pancasila adalah tugas setiap orang, bukan hanya tugas negara atau sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Audri, R. E. G. I. N. A. (2012). Sumber historis pancasila sebagai kajian sumber sosiologis pancasila. *Osf. Io*.
- Aurora, P. A. (2024, January). PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA SERTA PERKEMBANGAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Vol. 4, No. 1)*.
- Dewi, M. S., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai pancasila dari arus sejarah perjuangan dan dampak globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 305-317.
- Dewi, M. S., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai pancasila dari arus sejarah perjuangan dan dampak globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 305-317.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 157-171.
- Handayani, P., Limbong, S., & Ginting, M. R. (2023). PANCASILA DALAM LINTASAN SEJARAH. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 1993-2011.
- Ismi, Yuliana, and Fatma Ulfatun Najicha. "TRANSFORMASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN TERHADAP PANCASILA DARI MASA KE MASA."
- Purwanta, H. (2018). Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. *Jurnal Candi*, 18(2), 124-137.
- Ramadhan, M. A., Syaifi, S. R. A., Arsalan, F. N., & Fitriyono, R. A. (2022). Peranan Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(03), 78-84.
- Salma, Badriyatus, et al. "STUDI TENTANG DINAMIKA PANCASILA DARI MASA KE MASA." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 4.03 (2022): 130-136.
- SHAKTI, A. A. (2021). Esensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa indoensia.
- Syaparuddin, S., & Elihami, E. (2020). Peranan pendidikan nonformal dan sarana pendidikan moral. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 173-186.
- Wibowo, T. U. S. H. Pancasila Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1945-1965).